

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
NOMOR: NOMOR: 23/HK.01.01/K.JI-03/07/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN
PEMILU DAN PEMILIHAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. bahwa barang dugaan pelanggaran perlu dikelola secara tertib untuk mendukung proses penanganan pelanggaran Pemilihan Umum atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Pembentukan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penangan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil; Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 12. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021;
- 13. Surat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor 187/PP.00.01/K.JI/07/2021 Perihal Penerusan dan Tindak Lanjut Surat Edaran Bawaslu RI Tanggal 09 Juli 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan;
- KEDUA** : Unit Pengelola sebagaimana point PERTAMA bertugas melakukan Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Tanggal 30 Juni 2021.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar selaku Penanggung Jawab dan dikepalai oleh pejabat yang ditunjuk
- KEEMPAT** : Susunan Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2025

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal **17 Juli 2025**

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si

STRUKTUR KEANGGOTAAN
UNIT PENGELOLA BARANG DUGAAN PELANGGARAN PEMILU DAN PEMILIHAN
BAWASLU KABUPATEN BLITAR

NO	NAMA, PANGKAT, NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	NUR IDA FITRIA, S.Pd., M.Si Pimpinan Bawaslu	Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar	Pembina Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
2	MASRUKIN, M.Pd.I Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Blitar	Penanggung Jawab Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
3	NIKMATUS SHOLIHAH, S.Pd.,M.M Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
4	NARSULIN, S.H Pimpinan Bawaslu	Bawaslu Kabupaten Blitar Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
5	JAKA WANDIRA, S.Sos Pimpinan Bawaslu	Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
6	HERU SETYAWAN, S.Pd., S.E Pembina/IVa NIP. 197007051993031011	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Kepala Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
7	EDI SUTRIONO, S.E Penata Muda Tk.I/IIIb NIP. 198210062010011011	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
8	ANGGUN PENI PALUPIWATI, S.SOS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 199908042025052006	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
9	SYAUQI AL AMIN, S.H Analisis Hukum Ahli Pertama NIP. 200009252025051003	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
10	MUHAMMAD FAIQ IZZULHAQ, S.E Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Pertama NIP. 199904042025051004	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
11	AINUN NAJIB, S.Pd.I., M.Pd Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 199101012025211090	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
12	EKA FIFTY ANUGRAH, S.H., M.H Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 199508142024211022	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

13	ALUK SANJAYA, S.Pd., M.H Penata Layanan Operasional NIP. 199003172025211027	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
14	RIDHA ERVIANA, S.S Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama NIP. 198508252025212030	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
15	EKO SETYORINI, S.E Perencana Ahli Pertama NIP. 198104062023212029	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
16	M. HASAN AL ARIF, S.Hum Perencana Ahli Pertama NIP. 198604212025211031	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
17	DUDIK ABUBAKAR S, S.E Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 197511242025211008	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
18	M. LUKMAN HAKIM, S.SOS Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 198612142024211008	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
19	SANDI YUDHA SATRIAWAN, S. ST Pranata Komputer Ahli Pertama NIP. 199503072024211017	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
20	ARMA AGUSTIAN, S.H Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama NIP. 198308292025211025	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
21	MOHAMMAD SYAIFULOH ASHARI Pengadministrasi Perkantoran NIP. 197707272025211022	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
22	TATOK AMARUDDIN Pengelola Umum Operasional NIP. 196904032025211015	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran
23	M MAKINUDIN Pengadministrasi Perkantoran NIP. 197409072025211019	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Blitar	Anggota Unit Pengelola Barang Dugaan Pelanggaran

Ditetapkan di Kabupaten Blitar
Pada tanggal **17 Juli 2025**

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar,



Nur Ida Fitria, M.Si